

IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN

Implementation of The Conservation Partnership Program In Bukit Barisan Selatan National Park

Oleh:

Vivery Okthalamo¹, Doddy Aditya Iskandar¹, Adhie Masturiatna²

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada

²Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

verylamo@gmail.com

Diterima 08-08-2022, direvisi 22-12-2022, disetujui 26-12-2022

ABSTRAK

Ragam kepentingan terhadap kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Provinsi Lampung, mulai dari kepentingan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dihindari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hutan merupakan sumberdaya bersama (*Common Pool Resources*), sehingga diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang mampu menjamin kelestarian hutan dan mengakomodir pemanfaatan terhadap sumberdaya yang berada didalamnya. Kemitraan konservasi merupakan sebuah perwujudan pengelolaan kolaborasi yang dilaksanakan dikawasan TNBBS, yang dilandasi atas pemanfaatan getah Damar mata kucing yang berada didalam kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas program kemitraan konservasi, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif kualitatif, dengan mendeskripsikan tahapan pelaksanaan dan capaian program yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil evaluasi pelaksanaan program kemitraan konservasi yang dilaksanakan pada kawasan hutan TNBBS melalui pendekatan evaluasi CIPP dapat disimpulkan kurang efektif dan optimal. Efektivitas program kemitraan konservasi dinilai berdasarkan 12 Indikator yang ditetapkan hanya 7 (tujuh) indikator yang tercapai dan 5 (lima) indikator belum terpenuhi. Walaupun belum berjalan efektif dan optimal, kemitraan konservasi mampu mengubah paradigma masyarakat dalam mendukung tata kelola kawasan konservasi. Sehingga perlu adanya penguatan kebijakan, penyempurnaan aturan teknis program, serta peningkatan kualitas sumberdaya pengelola program.

Kata kunci: Taman Nasional, Pengelolaan Kolaborasi, dan Kemitraan Konservasi

ABSTRACT

Various interests in the forest area of Bukit Barisan Selatan National Park (TNBBS) in Lampung Province, ranging from ecological, economic, social and cultural interests are unavoidable. This condition shows that the forest is a common pool resource, so arrangements and management are needed that are able to ensure forest sustainability and accommodate the use of the resources in it. The conservation partnership is an embodiment of collaborative management carried out in the TNBBS area, which is based on the utilization of the Damar mata cat sap in the forest area. This study aims to evaluate and measure the effectiveness of the conservation partnership program, with the approach used in this research is qualitative deductive, by describing the stages of implementation and program achievements obtained from observations, interviews, and literature studies. The results of the evaluation of the implementation of the conservation partnership program carried out in TNBBS forest area through the CIPP evaluation approach can be concluded to be less effective and optimal. The effectiveness of the conservation partnership program is assessed based on 12 indicators that have been determined, only 7 (seven) indicators have been achieved and 5 (five) indicators have not been met. Although not yet effective and optimal, conservation partnerships are able to change the community paradigm in supporting conservation area management. So it is necessary to strengthen policies, improve program technical rules, and improve the quality of program management resources.

Keywords: National Parks, Collaborative Management and Conservation Partnership

I. PENDAHULUAN

Ragam kepentingan terhadap kawasan hutan konservasi menjadi tantangan bagi pengelola dan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar dapat mewujudkan strategi pengelolaan kawasan hutan yang adaptif dan partisipatif. Ostrom (1990), dalam bukunya menyebutkan bahwa hutan merupakan perwujudan dari *common pool resources* (CPRs), yaitu sebagai sumberdaya alam atau buatan yang nilai manfaatnya sangat tinggi dan usaha serta biaya untuk mengatur pemanfaatannya oleh pihak-pihak yang memanfaatkan sumberdaya tersebut terlalu tinggi, sehingga dalam pengelolaannya akan sulit untuk dilakukan. Dengan semangat mewujudkan perubahan paradigma pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian fungsi hutan, namun secara lebih luas kawasan hutan diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal tersebut perlu dikaji dan dianalisa secara komprehensif, sehingga upaya-upaya pemanfaatan terhadap kawasan konservasi dapat berjalan secara berimbang dan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan dalam implementasinya.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagai kawasan konservasi penting, seperti dinyatakan oleh Ulfa (2019) disebutkan bahwa TNBBS bersama dengan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci Sebelat ditetapkan sebagai situs warisan dunia (*Tropical Rainforest Heritage of Sumatra*) pada tahun 2004 oleh UNESCO. Sebagai kawasan hutan konservasi penting di Pulau Sumatera, TNBBS merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan hutan TNBBS tidak terlepas dari ancaman dan permasalahan dalam pengelolaannya.

Tingginya ketergantungan masyarakat akan potensi sumberdaya hutan memberikan dampak kerusakan terhadap kawasan hutan TNBBS. Dinyatakan oleh Santosa dalam Ristianasari (2013), bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal disekitar kawasan konservasi termasuk kedalam kategori miskin. Bahkan dalam rilis Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2007 diperoleh fakta bahwa 48,8 Juta masyarakat bergantung pada sumberdaya hutan dan 20% diantaranya termasuk dalam kategori miskin.

Salah satu permasalahan yang dijumpai adalah perambahan hutan dengan tujuan alih fungsi hutan untuk permukiman dan lahan pertanian yang terjadi di kawasan hutan TNBBS. Seperti disebutkan Misri (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa berdasarkan data Citra Landsat tahun 2002 teridentifikasi kerusakan hutan TNBBS seluas ± 57.089 Ha (17,5%) sebagai akibat perambahan dan *illegal logging*. Hal ini didukung oleh Suyadi (2006) menyebutkan bahwa hilangnya tutupan hutan di wilayah Way Pemerihan TNBBS cukup besar dengan laju deforestasi yang cukup tinggi sejak tahun 1998 yang disebabkan aktivitas perambahan oleh masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri pula, pemanfaatan terhadap kawasan hutan TNBBS telah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, bahkan sebelum kawasan konservasi ini ditetapkan.

Dengan melihat kondisi tersebut diatas, serta untuk memastikan fungsi pokok kawasan hutan konservasi dapat berjalan dengan optimal. Borrini-Feyerabend, dkk (2007) melihat pendekatan kolaborasi dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana terdapat dua atau lebih aktor sosial bernegosiasi, mendefinisikan dan berkomitmen antara mereka sendiri, guna membagi hak dan tanggung jawab pengelolaan suatu wilayah sumber daya alam dan memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut. Maka diperlukan strategi dalam pengelolaan kawasan hutan TNBBS, yang salah satunya diwujudkan melalui

program kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi dipandang sebagai perwujudan *collaborative management (Co-Management)* yaitu pengelolaan kawasan hutan konservasi dengan melibatkan peran serta masyarakat (*Participatory*) melalui pemberian akses pemanfaatan sumberdaya hutan. Ditambahkan oleh Hartoyo (2020), kemitraan konservasi bertujuan selain melindungi alam juga mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan. Implementasi program kemitraan konservasi juga harus diiringi dengan upaya pendampingan dan pengawasan oleh para pihak, sehingga tujuan dan output program dapat terwujud sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

Balai Besar TNBBS sebagai UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan mandat pengelolaan kawasan hutan, mengimplementasikan program kemitraan konservasi sebagai upaya mewujudkan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Program kemitraan konservasi telah berjalan sejak tahun 2017 dan pelaksanaannya berada pada Zona Tradisional TNBBS dengan bentuk kemitraan berupa akses pemungutan HHBK dan Budidaya Tradisional. Sedangkan Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dilaksanakan pada zona rehabilitasi dengan tujuan memperbaiki kondisi ekosistem yang rusak atau kritis. Berjalannya waktu kemitraan konservasi yang telah berjalan di kawasan hutan TNBBS perlu dilakukan evaluasi, sehingga dapat mengetahui ketercapaian program serta dampak program pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan TNBBS. Bappenas (2017), menyebutkan evaluasi sebagai penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Sedangkan Conley and Moote (2003) menyatakan bahwa evaluasi juga digunakan dalam menguji teori, seperti studi kasus evaluasi yang dilakukan oleh Coglianese pada

tahun 1999 yang menantang klaim teoritis bahwa pengambilan keputusan secara consensus mengarah pada hasil keputusan yang lebih baik. Mengingat program kemitraan konservasi masih berjalan dan terus berproses, maka penelitian evaluasi ini bersifat *evaluation on going*, yaitu evaluasi ini diartikan sebagai proses evaluasi yang dilakukan pada saat rencana dilaksanakan, untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan yang direncanakan sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program kemitraan konservasi yang telah berjalan dan mengukur efektifitas pelaksanaan program kemitraan konservasi di TNBBS. Dengan melihat tujuan tersebut, penelitian ini dibatasi pada program kemitraan konservasi pada kawasan hutan TNBBS yang sedang dilaksanakan (*on going*), yaitu Program kemitraan konservasi yang telah berjalan dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara pengelola kawasan hutan TNBBS bersama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai mitra konservasi.

II. METODE

1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

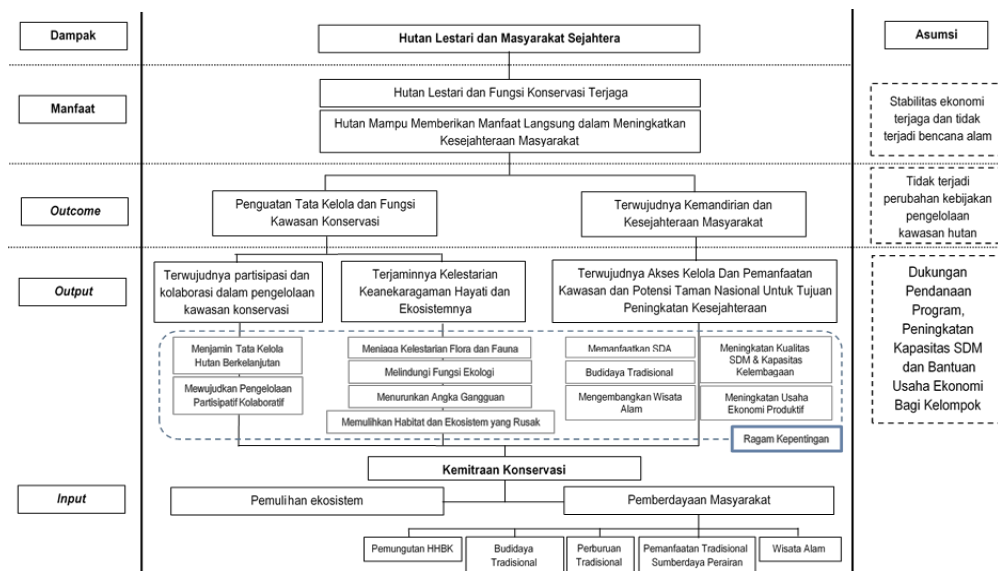
Penelitian ini dilaksanakan pada area kemitraan konservasi TNBBS yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Barat – Provinsi Lampung. Waktu pelaksanaan penelitian, dilakukan pada bulan April sampai dengan November 2021. yang meliputi tahapan penyusunan rencana, persiapan, pengumpulan data, analisa data dan penyusunan laporan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *evaluation research* atau penelitian evaluasi. Seperti dijelaskan oleh Sudaharsono dalam Ambiyar & Muharika (2019) menyatakan bahwa penelitian evaluasi merupakan pengumpulan informasi tentang

hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan objektif. Untuk mengukur efektivitas program kemitraan konservasi pada kawasan TNBBS dianalisa berdasarkan variabel dan indikator yang disusun berdasarkan kerangka kerja

normatif/ideal program (*Logical framework*). Sedangkan untuk mengetahui implementasi dan pelaksanaan program kemitraan konservasi di kawasan hutan TNBBS dilakukan melalui pendekatan wawancara, observasi atau pengamatan langsung dan dokumentasi serta disajikan secara deskriptif kualitatif.



Gambar 1. Konsep Ideal/Normatif Program Kemitraan Konservasi
 Figure 1. Ideal/Normative Concept of Conservation Partnership Program
 Sumber: Analisa Penulis, 2021

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan rangkaian proses mengumpulkan data dan informasi untuk menjawab tujuan dari suatu penelitian, beragam cara dan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik triangulasi, menurut Sugiyono (2018) triangulasi merupakan tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun jenis data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi lapang dan dokumentasi lapang. Wawancara dilakukan dengan narasumber atau informan yang memiliki kapasitas dan

kapabilitas serta mengetahui tiap-tiap proses kemitraan konservasi di kawasan hutan TNBBS.

Sedangkan Observasi dan dokumentasi lapangan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara visual kepada peneliti terhadap objek penelitian, kondisi lingkungan serta proses dari tiap-tiap tahapan program kemitraan konservasi, sekaligus mengkonfirmasi informasi dan data sekunder yang telah diperoleh. Data sekunder sendiri merupakan dokumen terkait program kemitraan konservasi yang dimiliki oleh pengelola TNBBS dan instansi terkait, serta berasal dari sumber literatur yang relevan.

Menurut Hadiarto (2016) dalam melakukan evaluasi perlu dipersiapkan instrumen atau panduan terkait hal-hal yang akan dievaluasi, diantaranya 1). Apa dasar

pelaksanaan dan mengapa program perlu dilaksanakan, 2). Sejauh apa keterlaksanaan program tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu ditentukan variabel dan indikator penelitian sebagai dasar dalam melakukan evaluasi. Penentuan variabel dan indikator penelitian menggunakan pendekatan kerangka kerja kerja normatif/ideal program (*Logical framework*) yaitu penyusunan konsep ideal/normatif program, melalui konsep tersebut dapat dilihat keterkaitan *ouput* dan *outcome* yang menjadi sasaran program kemitraan konservasi.

Untuk mengukur efektivitas program kemitraan konservasi adalah dengan melihat ketercapaian indikator yang telah ditetapkan berdasarkan konsep ideal/normatif program, baik indikator *output* maupun indikator *outcome* program kemitraan konservasi tersebut. Berdasarkan pengukuran ketercapaian indikator tersebut, dapat diklasifikasikan tingkat efektivitas program kemitraan konservasi, sebagai berikut,

- *Efektif* jika indikator *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan tercapai secara keseluruhan;

- *Kurang Efektif* jika sebagian indikator *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai; dan
- *Tidak Efektif* jika tidak satupun *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Data yang terkumpul dianalisa, dan telah diuji validitas serta realibilitasnya, Seperti disampaikan oleh Stainback dalam Sugiyono (2018) mengatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek realibitas, sedangkan penelitian kualitatif lebih kepada aspek validitas data. Salah satu langkah yang dipakai dalam menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan adalah dengan menggunakan pendekatan uji kredibilitas melalui pendekatan triangulasi. Patton (2002) menyatakan bahwa triangulasi dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan menggabungkan hasil wawancara dan observasi serta menggabungkan beberapa jenis data yang memiliki kesamaan tujuan atau memastikan perspektif teoritis saling berkompetisi menghasilkan analisa tertentu. Adapun pelaksanaan pengumpulan data serta indikator dan tolak ukur evaluasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 dibawah ini.

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data
Table 1. Data Collection Techniques

Tujuan	Pertanyaan Evaluasi	Bentuk Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Analisa Data
Mengevaluasi program kemitraan konservasi pada kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	Apa yang mendasari pelaksanaan program dan tujuan dari program kemitraan konservasi? (Konteks)	Informasi dari Pengelola Kawasan TNBBS dan Kelompok Mitra Konservasi	Pengelola TNBBS dan Pengurus KTH Sebagai Kelompok Mitra Konservasi	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi Lapangan serta Studi Literatur	Deskriptif Kualitatif
	Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan apa peranan masing-masing pihak? (Input)	Informasi dari Pengelola Kawasan TNBBS dan Kelompok Mitra Konservasi	Pengelola TNBBS dan Pengurus KTH Sebagai Kelompok Mitra Konservasi	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi Lapangan serta Studi Literatur	Identi-fisikasi stakeholder
	Bagaimana Proses Implementasi/Pelaksanaan Program Kemitraan Konservasi di TNBBS? (Proses)	Informasi dari Pengelola Kawasan TNBBS dan Kelompok Mitra Konservasi	Pengelola TNBBS dan Pengurus KTH Sebagai Kelompok Mitra Konservasi	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi Lapangan serta Studi Literatur	Deskriptif Kualitatif
	Apa dampak/perubahan setelah berjalannya program kemitraan konservasi? (Output)	Kondisi Sebelum dan sesudah berjalannya program kemitraan konservasi	Pengelola TNBBS, Pengurus KTH dan Para Pihak	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi Lapangan serta Studi Literatur	Deskriptif Kualitatif

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Tabel 2. Indikator dan Tolak Ukur Efektivitas Program Kemitraan Konservasi

Table 2. Indicators and Benchmarks for the Effectiveness of the Conservation Partnership Program

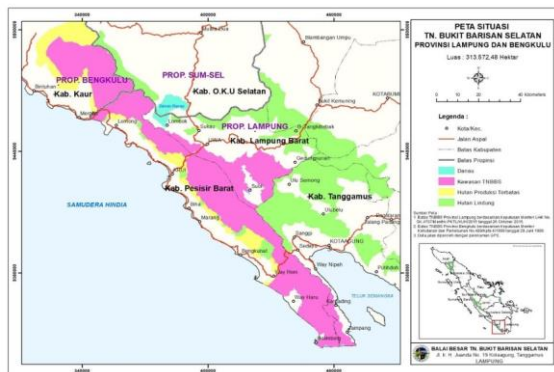
Nama Program	Outcome	Output	Indikator	Tolak Ukur
Kemitraan Konservasi	Penguatan Tata Kelola dan Fungsi Kawasan Konservasi	Terwujudnya partisipasi dan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi	1) Tercapainya kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Kawasan 2) Terbentuknya Kelompok Kemitraan Konservasi 3) Luas Zona Tradisional dan Zona Rehabilitasi yang dikelola melalui skema kemitraan konservasi 4) Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kolaborasi 5) Kontribusi Masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional	1) Telah ditanda tangannya nota kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama terkait kemitraan konservasi 2) Telah terbentuk Kelompok tani hutan dalam rangka kemitraan konservasi 3) Luas zona tradisional dan rehabilitasi yang telah dikelola melalui skema kemitraan konservasi sebesar 10% dari luas zona pengelolaan yang telah ditetapkan 4) Telah tersusun rencana pengelolaan kolaborasi pada masing-masing kelompok mitra konservasi 5) terdapat kontribusi kelompok mitra konservasi dalam rangka mendukung pengelolaan Taman Nasional
		Terjaminnya Kelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya	1) Angka Gangguan/ Permasalahan menurun 2) Kondisi Tutupan Lahan Meningkat 3) Peningkatan Populasi dan Sebaran Satwa dilindungi	1) Terjadi penurunan angka gangguan terhadap kawasan hutan TNBBS. 2) Tidak terdapat aktivitas pembukaan lahan dan terlaksananya rehabilitasi pada area terbuka yang dikelola melalui skema kemitraan konservasi 3) Peningkatan populasi satwa dilindungi dan tidak terjadi konflik satwa liar.
		Terwujudnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya Akses Kelola dan Pemanfaatan Kawasan konservasi dalam rangkaian Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sekitar	1) Meningkatnya hasil produksi masyarakat 2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat 3) Berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap potensi SDA Hutan

Sumber: Analisa Penulis, 2021

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kawasan TNBBS

Kawasan hutan TNBBS merupakan kawasan pelestarian alam yang berada di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, dan secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Kaur. Kawasan konservasi ini memiliki luas 313.572,48 Ha dengan kondisi topografi mulai dari ketinggian 0 MDpl hingga 1.964 MDpl, serta memiliki tipe vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, hutan pamah tropika hingga hutan pegunungan.



Gambar 2. Peta Situasi Kawasan Hutan TNBBS
Figure 2. Situation Map of the TNBBS Forest Area
Sumber: Balai Besar TNBBS

Kekayaan potensi SDA yang berada di dalam kawasan hutan TNBBS tidak terlepas dari kehidupan masyarakat setempat, khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang telah melakukan pemanfaatan getah Damar Mata Kucing (*Shorea javanica*) sebagai sumber penghasilannya. Aktivitas pemanfaatan ini telah dilakukan secara turun temurun, jauh sebelum kawasan konservasi ini ditunjuk dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang mengedepankan kelestarian kawasan hutan¹. Secara aturan perundangan yang berlaku, aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi dan SDA merupakan bentuk aktivitas ilegal dan termasuk kedalam ancaman/gangguan. Sehingga upaya-upaya persuasif dan represif diambil oleh pengelola kawasan TNBBS untuk membatasi aktivitas pemanfaatan tersebut.

¹ Wawancara dengan Anggota Mitra Konservasi TNBBS pada tanggal 28 September 2021

Diawal dekade tahun 2000, paradigma pengelolaan kawasan hutan konservasi mengalami pergeseran. Pelibatan para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan atau dikenal sebagai *collaborative management* menjadi salah satu langkah dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hutan konservasi. Berjalannya waktu tidak hanya partisipasi dalam upaya perlindungan kawasan hutan yang terwujud, namun juga akses dalam pemanfaatan kawasan hutan konservasi oleh masyarakat setempat dapat dilaksanakan melalui skema kemitraan konservasi.

Balai Besar TNBBS melihat kemitraan konservasi sebagai salah satu cara pandang baru kelola kawasan konservasi yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat, namun disisi lain masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian SDA yang berada di dalamnya². Hal ini sesuai dengan prinsip kolaborasi, dimana pihak-pihak yang bekerjasama memperoleh keuntungan dan kewajiban yang sama dan diputuskan melalui kesepakatan kerjasama.



Gambar 3. Pemanfaatan Getah Damar Mata Kucing
Figure 3. Utilization of Cat's Eye Resin
Sumber: Dokumentasi Balai Besar TNBBS

2. Dasar Pelaksanaan Program Kemitraan Konservasi di kawasan TNBBS

Kemitraan konservasi di Kawasan hutan TNBBS berpedoman pada Perdirjen KSDAE nomor 6 tahun 2018, dilaksanakan pada Zona Tradisional dengan luas zona 2.446,90 Ha

diperuntukkan untuk kegiatan Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta Zona Rehabilitasi dengan luas zona 52.546,04 Ha untuk kegiatan Pemulihan Ekosistem yang salah satunya dilaksanakan dengan pola kemitraan konservasi. Penentuan lokasi area kemitraan konservasi pada zona tradisional maupun zona rehabilitasi diawali dengan proses inventarisasi dan identifikasi potensi serta permasalahan kawasan. Proses ini dilakukan untuk mengetahui potensi SDA, jenis dan bentuk pemanfaatan SDA, serta aspek kesejarahan pemanfaatan SDA yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut diperoleh deskripsi pemanfaatan yang menjadi dasar ditetapkannya zona tradisional, serta area terbuka (*open area*) yang perlu dilakukan pemulihan ekosistem untuk ditetapkan sebagai zona Rehabilitasi. Adapun zona tradisional yang telah dikelola melalui skema kemitraan konservasi, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Kemitraan Konservasi TNBBS
Table 3. TNBBS Conservation Partnership

No	Nama Kelompok	Area Kemitra-an (Ha)	Wilayah Pengelolaan	Lokasi Wilayah administrasi
1	KTH Damar Peseban	40,10	Resort Balai Kencana, SPTN III Kruki, BPTN II Liwa	Pekon Penengahan Kec. Karya Penggawa, Kab. Pesisir Barat
2	KTH Mandapalu	68,48	Resort Balai Kencana, SPTN III Kruki, BPTN II Liwa	Pekon Penengahan Kec. Karya Penggawa, Kab. Pesisir Barat
3	KTH Damar Indah Jaya	87	Resort Balai Kencana, SPTN III Kruki, BPTN II Liwa	Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Kruki, Kab. Pesisir Barat
4	KTH Pak Teba Kami	130,39	Resort Biha, SPTN II Bengkuntat, BPTN I Semaka	Pekon Biha Kec. Bengkuntat, Kab. Pesisir Barat
5	KTH Tebak Bunuk Makmur	16,0	Resort Balai Kencana, SPTN III Kruki, BPTN II Liwa	Pekon Ulu Kruki Kec. Way Kruki, Kab. Pesisir Barat
6	KTH Tebak Bunuk Lestari	13,75	Resort Balai Kencana, SPTN III Kruki, BPTN II	Pekon Gunung Kemala Kec. Way Kruki, Kab. Pesisir

² Wawancara dengan Pengelola TNBBS pada tanggal 15 Oktober 2021

No	Nama Kelompok	Area Kemitra-an (Ha)	Lokasi	
			Wilayah Pengelolaan	Wilayah administrasi
			Liwa	Barat
7	KTH Tengkulak Jaya	22,50	Resort Balai Kencana, SPTN III Krui, BPTN II Liwa	Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Lokasi area kemitraan konservasi yang menjadi objek pengamatan dan pengumpulan data, apabila dilihat dari aspek kesejarahannya merupakan kebun atau *repong* yang ditanami oleh masyarakat pada periode waktu 1960 - 1980. Hal ini dapat dibuktikan dengan dapat dijumpainya jenis-jenis tanaman *eksotis* (bukan tanaman asli) seperti Damar, Cengkeh, Kelapa dan beberapa jenis tanaman MPTS (*Multipurpose trees species*) yang memiliki diameter batang sudah lebih dari 40 Cm pada kawasan hutan TNBBS. Harianto *et all* (2016) mengatakan *repong* merupakan wujud kearifan lokal yang dimiliki Indonesia dalam pengelolaan sistem *agroforestry* kompleks yang melibatkan masyarakat dengan hukum adatnya. Masyarakat beranggapan bila menebang Damar Mata Kucing maka akan berakibat buruk terhadap keluarga, dan bila memperkaya kebun damarnya dengan menanam tanaman buah lainnya seperti duku, duren, jengkol, petai, dan manggis, maka masyarakat meyakini akan berdampak melimpahnya getah damar yang akan mereka panen kelak.

Program kemitraan konservasi yang telah berjalan di kawasan hutan TNBBS sejak tahun 2017, diharapkan mampu menjadi solusi mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan yang disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan oleh masyarakat yang berada disekitarnya. Untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program kemitraan konservasi, terdapat beberapa aspek yang menjadi kriteria evaluasi terkait konteks, input, proses dan dampak.

Terkait kriteria *konteks* pelaksanaan program kemitraan konservasi di kawasan hutan TNBBS dilihat berdasarkan 3 (tiga)

indikator. Indikator pertama adalah dasar pelaksanaan program, diketahui bahwa Kemitraan konservasi di kawasan hutan TNBBS didasari atas pemanfaatan potensi sumberdaya hutan berupa getah damar (hasil hutan bukan kayu) telah dilaksanakan secara turun temurun dilakukan pada repong-repong damar yang berada zona tradisional, bahkan jauh sebelum kawasan TNBBS ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Selain itu kemitraan konservasi juga dipandang sebagai cara pandang baru dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif mulai dari aspek perlindungan, pengamanan, pengawetan dan pemanfaatan.

Indikator kedua terkait evaluasi *konteks* pelaksanaan program adalah tujuan pelaksanaan program, dilihat berdasarkan pandangan mitra konservasi (masyarakat) sebagai upaya memberikan akses pemanfaatan kawasan hutan TNBBS khususnya pada zona tradisional kepada masyarakat sekitar hutan yang secara kesejarahannya aktivitas pemanfaatan tersebut telah dilakukan secara turun temurun dengan tetap mengedepankan kelestarian hutan dalam pemanfaatannya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Yulizar *et all* (2014), mengatakan bahwa repong damar merupakan daerah penunjang perekonomian dan penambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang telah dilakukan oleh masyarakat Krui secara turun temurun. Sedangkan dari sisi pengelola kawasan hutan TNBBS, kemitraan konservasi merupakan wujud menempatkan masyarakat sebagai mitra pengelola kawasan dalam upaya perlindungan dan pengamanan, pengawetan serta pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan. Sasaran program kemitraan konservasi, yang telah diatur pada peraturan teknis disebutkan bahwa mitra konservasi adalah masyarakat setempat yang tinggal berdampingan dengan kawasan konservasi, sedangkan area kemitraan konservasi dibatasi pada zona/blok tradisional dan rehabilitasi. Berdasar aturan tersebut, saat ini pelaksana

program membatasi mitra konservasi adalah masyarakat yang memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa damar mata kucing yang telah dilakukan secara turun temurun pada zona tradisional TNBBS yang telah ditetapkan. Hingga saat ini jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam kemitraan konservasi sebanyak 7 (tujuh) KTH dan luas area kemitraan konservasi sebesar 378,22 Ha (15,46%) pada zona tradisional, dan belum terlaksana pada zona rehabilitasi.

Berdasarkan ketiga indikator evaluasi *konteks*, program kemitraan konservasi pada kawasan TNBBS mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan getah damar mata kucing dan disisi lain masyarakat diharapkan mampu berperan dalam upaya perlindungan, pengamanan dan mempertahankan kelestarian kawasan hutan, namun apabila dilihat dari kuantitas capaian sasaran program masih belum optimal mengingat luas zona tradisional dan rehabilitasi yang dikelola melalui skema kemitraan konservasi masih cukup rendah.

3. Identifikasi Peran Para Pihak

Kriteria evaluasi *input* dilihat berdasarkan indikator pelibatan *stakeholder* dan skema *share resources*. Berdasarkan analisa dan identifikasi *stakeholder* pada program kemitraan konservasi, selain pengelola kawasan TNBBS dan mitra konservasi (masyarakat) juga melibatkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya. Para pihak yang terlibat meliputi Pemerintah Pusat (Kementerian LHK), Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung), Pemerintah Desa dan NGO (YABI dan WWF-Indonesia). Pemerintah Desa dan NGO berperan dalam pendampingan pelaksanaan program, mulai dari tahapan persiapan pelaksanaan program yaitu pembentukan kelompok, identifikasi area kemitraan, hingga pemetaan secara partisipatif, hingga implementasi program. Sedangkan Pemerintah daerah berperan dalam mendukung pembinaan kelompok mitra konservasi bersama dengan

pengelola kawasan TNBBS. Dengan melihat kondisi dan peran *stakeholder* yang terlibat pada program kemitraan konservasi di TNBBS, pelibatan *stakeholder* belum optimal dalam berperan dan berbagi sumberdaya yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan kerjasama kemitraan konservasi yang menjadi landasan/acuan dalam pembagian peran dan tanggungjawab antar *stakeholder*, hanya terwujud pada tingkatan pengelola kawasan TNBBS dan Kelompok Masyarakat. Sedangkan *stakeholder* lain belum terikat dan menjadi bagian dari kesepakatan kerjasama program kemitraan konservasi tersebut.

Penganggaran dan pembiayaan program kemitraan konservasi masih sangat dipengaruhi alokasi anggaran Balai TNBBS, sedangkan pembiayaan kelompok masyarakat berasal dari swadaya kelompok dalam bentuk iuran bulanan yang besarnya berbeda-beda antar kelompok sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Skema *share resources* tidak hanya sebatas pada pembagian anggaran ataupun pembiayaan, namun juga pembagian peran dalam upaya-upaya konservasi serta dukungan terhadap pengelolaan kawasan TNBBS tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan masyarakat yang berada disekitarnya, masyarakat selama 24 Jam berada dan bersinggungan langsung dengan kawasan TNBBS Pengelola TNBBS memiliki kendala terbatasnya SDM dalam upaya perlindungan dan pengawasan hutan. Kemitraan konservasi ini memberi peluang bagi pengelola, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya pengelolaan TNBBS dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan tanpa merusak ekosistem yang ada³.

Berdasarkan pernyataan diatas, kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat dilihat sebagai aksi bersama (*collective action*) dengan tujuan memberikan

³ Wawancara dengan Pengelola Kawasan TNBBS pada tanggal 15 Oktober 2021

nilai manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dengan tetap mengedepankan aspek partisipatif dan berkelanjutan. Adapun evaluasi terkait *input* program kemitraan konservasi di TNBBS, berdasarkan kedua indikator diatas adalah penguatan pembagian peran dan tanggungjawab *stakeholder* melalui kesepakatan kerjasama yang disusun dan ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan program.

4. Implementasi Program Kemitraan Konservasi di Kawasan TNBBS

Evaluasi *proses* dilakukan untuk menilai kesesuaian tiap-tiap tahapan program dengan memperhatikan rencana yang telah ditetapkan. Pengelola kawasan hutan TNBBS menyusun rencana program kemitraan konservasi dengan mempedomani aturan teknis yang disusun oleh Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK. Landasan pelaksanaan program kemitraan konservasi telah diatur dalam Perdirjen KSDAE nomor 6 tahun 2018, yang telah mengatur secara mendetail tahapan-tahapan pelaksanaan program. Adapun tahapan pelaksanaan program kemitraan konservasi di TNBBS dibedakan menjadi tahap Pra-pelaksanaan, Pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kemitraan konservasi di kawasan hutan TNBBS telah berpedoman dan terlaksana sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, seperti digambarkan pada skema dibawah ini.



Gambar 4. Tahapan Program Kemitraan Konservasi

Figure 4. Stages of the Conservation Partnership Program

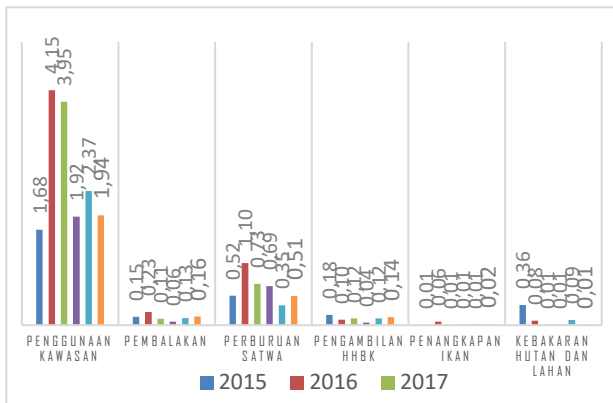
Sumber: Analisa Penulis, 2021

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program belum mampu memberikan gambaran ketercapaian program kemitraan konservasi, baik yang dilakukan oleh pengelola kawasan TNBBS maupun masyarakat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih bersifat menyajikan data-data secara kuantitatif, dan belum membahas secara detail permasalahan dan capaian-capaian program. Sehingga hasil monitoring dan evaluasi tersebut belum dapat menjadi dasar ataupun pedoman bagi dalam pengambilan keputusan/kebijakan.

5. Dampak Program Kemitraan Konservasi di Kawasan TNBBS

Evaluasi dampak dilaksanakan melalui pendekatan analisa kondisi sebelum dan membandingkan dengan kondisi setelah dilaksanakannya program kemitraan konservasi, adapun kondisi yang menjadi focus amatan adalah kondisi ekologi area kemitraan konservasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ekologi area kemitraan konservasi dilihat berdasarkan faktor keberadaan potensi flora dan fauna, tutupan lahan dan tingkat gangguan/ kerawanan yang dianalisa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau periode waktu sebelum dan sesudah diimplementasikannya program kemitraan konservasi. Keberadaan flora dan fauna serta kondisi ekosistem (tutupan lahan) pada area kemitraan konservasi tidak mengalami banyak perubahan, hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program kemitraan konservasi dilaksanakan pada zona tradisional dan zona rehabilitasi serta bukan menjadi habitat alami flora dan fauna yang dilindungi. Secara tidak langsung aktivitas pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak mengganggu keberadaan potensi flora, fauna dan ekosistem yang berada didalamnya. Sedangkan apabila dilihat dari tren angka

gangguan dan kerawanan terhadap kawasan hutan TNBBS dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, seperti digambarkan pada grafik dibawah ini.



Gambar 5. Angka Gangguan Terhadap Kawasan Hutan TNBBS Kurun Waktu 2015-2020

Figure 5. Number of Disturbance to Forest Areas of TNBBS 2015-2020 Period

Sumber: Balai Besar TNBBS, 2021

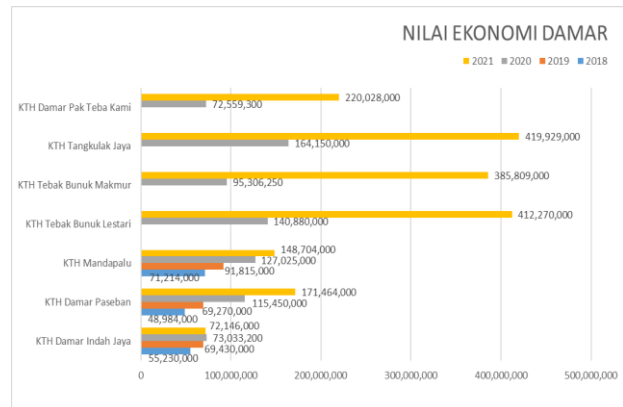
Perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari persepsi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hutan TNBBS serta hasil produksi damar dan pendapatan masyarakat. Pengelolaan kolaborasi melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan TNBBS, telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pemanfaatan SDA yang berada didalam kawasan hutan. Bentuk pemanfaatan SDA dengan mengedepankan aspek keberlanjutan dan kelestarian kawasan hutan TNBBS, menjadi dasar terwujudnya program kemitraan konservasi yang telah disepakati para pihak. Perubahan paradigma pemanfaatan SDA secara *eksploratif* menjadi *sustainability* (keberlanjutan), tidak mempengaruhi hasil produksi damar dan pendapatan masyarakat. Apabila dilihat dari data tren hasil produksi maupun pendapatan masyarakat, perubahan tersebut memberikan kondisi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Produksi Damar Kelompok Mitra Konservasi TNBBS

Table 4. Results of Damar Production of BBSNP Conservation Partner Group

No	Nama Kelompok	Jumlah Produksi Damar Per Tahun (Kg)			
		2018	2019	2020	2021
1	KTH Damar Indah Jaya	3.945	4.162	4.163	2.470
2	KTH Damar Paseban	3.768	4.618	4.618	5.374
3	KTH Mandapalu	5.478	6.121	5.081	4.647
4	KTH Tebak Bunuk Lestari	-	-	4.696	11.105
5	KTH Tebak Bunuk Makmur	-	-	5.069	11.204
6	KTH Tangkulak Jaya	-	-	7.351	12.985
7	KTH Damar Pak Teba Kami	-	-	2.499	6.600

Sumber: Balai Besar TNBBS, 2021



Gambar 6. Nilai Ekonomi Getah Damar

Figure 6. Economic Value of Damar Gum

Sumber: Balai Besar TNBBS, 2021

6. Efektivitas Program Kemitraan Konservasi di TNBBS

Dengan memperhatikan hasil evaluasi program kemitraan konservasi yang dilaksanakan pada kawasan TNBBS, Program kemitraan konservasi belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan optimal. Partisipasi dan dukungan para pihak terhadap program kemitraan konservasi sebagai perwujudan pengelolaan kolaborasi belum sepenuhnya tercapai, kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah maupun lembaga/instansi lain belum diatur pada aturan/pedoman teknis kemitraan konservasi. Aturan teknis Kemitraan konservasi yang telah ditetapkan masih dijumpai beberapa kelemahan dan tidak dapat dilaksanakan pada kondisi hutan konservasi yang beragam tipologinya. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memunculkan beragam kebijakan yang diambil pengelola kawasan terkait pelaksanaan program di masing-masing kawasan hutan konservasi.

Pengukuran efektivitas pelaksanaan program kemitraan konservasi di kawasan hutan TNBBS, dilakukan dengan melihat ketercapaian *output* dan *outcome* yang disusun berdasarkan konsep ideal/normatif pelaksanaan program kemitraan konservasi. Adapun *outcome* yang diharapkan atau menjadi kriteria dan indikator ketercapaian program kemitraan konservasi adalah terwujudnya penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi serta terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat seperti dijelaskan pada tabel 2 diatas. Efektivitas program merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Hadiarto,2016).

Efektivitas merupakan ukuran atau nilai yang mampu menggambarkan ketepatan dari suatu tujuan yang akan dicapai. Pada beberapa kasus, efektivitas juga digunakan untuk menggambarkan proses yang sedang dan telah terlaksana, sebagai upaya memberikan masukan, rekomendasi dan perbaikan atas program tersebut. Sama halnya dengan penelitian ini, efektivitas program yang dievaluasi bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan dan mengidentifikasi ketepatan sasaran program, sehingga dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi pengelola kawasan TNBBS dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan program kemitraan konservasi diwaktu yang akan datang.

Berdasarkan ketercapaian indikator efektivitas program kemitraan konservasi yang dilaksanakan pada kawasan hutan TNBBS, dari kedua belas indikator terdapat 5 (lima) indikator yang tidak tercapai serta 7 (tujuh) indikator efektivitas program yang tercapai, diantaranya: 1). Tercapainya kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Kawasan, 2). Terbentuknya Kelompok Kemitraan Konservasi, 3). Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kolaborasi, 4). Kontribusi

Masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional, 5). Angka Gangguan/ Permasalahan menurun, 6). Meningkatnya hasil produksi masyarakat, dan 7). Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Dengan tidak sepenuhnya indikator penilaian yang tercapai, maka dapat dinilai efektivitas program kemitraan konservasi di kawasan hutan TNBBS dikategorikan “Cukup Efektif”.

Beberapa indikator yang tidak tercapai diantaranya luas zona tradisional dan zona rehabilitasi yang dikelola melalui program kemitraan konservasi, kondisi tutupan lahan, kontribusi instansi dan lembaga lain pada program kemitraan konservasi, peningkatan populasi dan sebaran satwa dilindungi serta berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap potensi SDA Hutan. Ketidaktercapaian tersebut lebih disebabkan belum sepenuhnya program kemitraan konservasi terlaksana, seperti pada beberapa lokasi yang terdapat aktivitas pemanfaatan oleh kelompok masyarakat calon mitra konservasi sedang berproses mencapai kesepakatan kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat maupun kemitraan dalam rangka pemulihan ekosistem.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kemitraan konservasi yang dilaksanakan pada kawasan hutan TNBBS melalui pendekatan evaluasi CIPP dapat disimpulkan belum efektif dan optimal terlaksana. Efektivitas program kemitraan konservasi, diukur dengan memperhatikan ketercapaian indikator evaluasi yang disusun menggunakan pendekatan kerangka kerja logis (*logical framework*). Efektivitas program kemitraan konservasi masuk kedalam kategori “Kurang Efektif”, dari 12 Indikator yang ditetapkan hanya 7 (tujuh) indikator yang tercapai dan 5 (lima) indikator belum terpenuhi.

2. Saran

Terdapat beberapa kelemahan terkait peraturan teknis (Perdirjen KSDAE nomor: P.6/2018) yang telah ditetapkan dan mengatur tata cara pelaksanaan kemitraan konservasi di kawasan konservasi agar dapat disempurnakan/ revisi. Adapun poin-poin yang menjadi catatan diantaranya; Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kemitraan konservasi, Monitoring dan evaluasi program, Lokasi kemitraan konservasi, Kegiatan-kegiatan dalam kemitraan konservasi, Kelompok sasaran/mitra konservasi, Kapasitas SDM serta *Reward and Punishment*.

Selain itu, Dengan melihat masih belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dan rendahnya dukungan para pihak dalam program kemitraan konservasi, maka diperlukan upaya sosialisasi dan membangun kesepahaman bersama terkait upaya kolaborasi dalam pengelolaan kawasan hutan TNBBS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiyar dan Muharika 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta
- Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2019. *Revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (313.572, 48 Ha) Provinsi Lampung dan Bengkulu*. Tidak dipublikasikan. Kota Agung.
- Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2020. *Revisi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung dan Bengkulu Periode 2015 – 2024*. Tidak dipublikasikan. Kota Agung.
- Borrini-Feyerabend G, Farvar MT, Nguingui JC and Ndangang VA. 2007. *Co- Management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning-by-Doing*. Heidelberg (Germany): GTZ and IUCN.
- Conley, Alexander., and Moote, Margaret A. 2003. *Evaluating Collaborative Natural Resources Management*. *Journal Society and Natural* 16: 371-386.
- Hadiarto, Danang. 2016. *Evaluasi Program Kasus Alih Fungsi Pasar Kota Caruban*. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Teknik UGM. Yogyakarta
- Harianto, S. P., Dewi, B.S., Rusita. 2016. *Repong Damar. Plantaxia*. Yogyakarta.
- Hartoyo, Didin., dkk. 2020. Kemitraan Konservasi dan Masa Depan Hutan Papua. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 22 No. 22*: 148-157.
- Misri, S. 2010. *Penanganan Perambahan Hutan Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Analisis faktor-faktor yang Memengaruhi efektivitas penegakan hukum perambahan hutan)*. Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institution for Collective Action*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Patton, MQ. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Mehods (3rd.)*. California: Sage Publishing
- Ristianasari. 2013. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS): Kasus Model Desa Konservasi (MDK) di Pekon Sukaraja Atas dan Pekon Kubu Prahu, Lampung*. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor – Jawa Barat
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suyadi & David LA. Gaveau. 2006. Kecendrungan dan Faktor Penyebab Deforestasi di Way Pemerihan TNBBS, Lampung Barat. *Jurnal Biologi Indonesia Vol. 4 (1)*: 39-52.
- Ulfa, Raisha., dkk. 2019. Kebun Binatang Habitat Leuser Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan Vol.3, No.2*, Hal. 11-16.
- Yulizar, Hikmat, A., Koesmaryandi, N. 2014. Konservasi Damar Mata Kucing (*Shorea javanica*) Berbasis Masyarakat di Zona Tradisional Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Media Konservasi Vol. 19, no. 2*: 73-80.

PERATURAN

- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.
- Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

